

**EFEKTIVITAS DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
INFRASTRUKTUR DESA TELLU BOCCOE KECAMATAN MARE
DI KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

SKRIPSI



**FAJAR ADI SAPUTRA
NIM: 105711100217**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

**EFEKTIVITAS DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN
INFRASTRUKTUR DESA TELLU BOCCOE KECAMATAN MARE
DI KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

SKRIPSI

Di Susun dan Diajukan Oleh:

FAJAR ADI SAPUTRA

NIM: 105711100217

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO HIDUP

**Ketika masih hidup, kesempatan itu tak terbatas
Fajarnvg**



PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya Serta karunianya
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.
Alhamdulillah rabbi'alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk keduaorang tuaku tercinta
Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur
Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Di Kabupaten Bone Tahun 2022
Nama Mahasiswa : Fajar Adi Saputra
No. Stambuk/NIM : 105711100217
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji seminar hasil starta (S1) pada tanggal 25 Mei 2024 di program studi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.

Makassar, 5 Juni 2024

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Pembimbing II

Asdar, SE., M. Si.,
NBM: 1151132

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM: 651 507

Mengetahui
Ketua Program Studi

Asdar, S.E. M.Si
NBM: 1151132



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



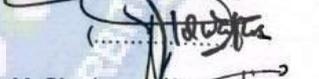
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Fajar adi saputra Nim : 105711100217 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/60201/091004/2024M, Tanggal 17 Dzulqaidah 1445 H/ 25 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Dzulqaidah 1445 H

25 Mei 2024 M

PANITIA UJIAN

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. Ambo Asse, M. Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |  |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Hj. Arniati, SE., M. Pd |  |
| | 2. Ismail Rasulong, SE., M. M |  |
| | 3. Asdar, SE., M.Si. |  |
| | 4. A. Nur Achasanuddin UA, S.E, M. Si |  |

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Adi Saputra
Nim : 105711100217
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur
Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Di Kabupaten Bone Tahun 2022

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah Asli Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 20 Mei 2024



Fajar Adi Saputra
NIM: 105711100217

Diketahui Oleh



Dr. H. Andi Sam'an, SE., M.Si
NBM: 651.507

Ketua Program Studi

Asdar, SE., M. Si.,
NBM: 1151132

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Di Kabupaten Bone Tahun 2022”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Muh. Nasrum dan ibu Megawati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta doa restu atas keberhasilan

penulis dalam menuntut ilmu hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Ambo Asse Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar, SE., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Jam'an, SE., M. Si., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Asdar, SE., M. Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunyakepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi sahabat sekaligus telah menjadi saudara selama studi ini.
9. Terima kasih untuk Sahabatku A. Sahrul, SE Syang selalu mendukung dan memberikan waktu, mencari solusi dalam penyusunan ku ini.
10. Teman-teman kelas EP.17 A yang telah menemani dan memperhatikan sayaselama studi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penuh Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang

telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 8 Ramdhan 1445 H
19 Maret 2024 M

Penulis,

FAJAR ADI SAPUTRA

ABSTRAK

FAJAR ADI SAPUTRA, Tahun 2024. Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Di Kabupaten Bone. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Jam'an dan Pembimbing II bapak Asdar.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare di Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada 6 orang informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Umum, Kepala Dusun serta masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa Program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare di Kabupaten Bone sudah cukup berjalan dengan baik jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan, dimana dalam pelaksanaan program tersebut semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum melaksanakan program pembangunan, kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi, dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangkan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

Kata Kunci: Efektivitas Dana Desa, Pembangunan Ekonomi dan infrastruktur Desa

ABSTRACT

FAJAR ADI SAPUTRA, 2024. Effectiveness of Village Funds for Economic and Infrastructure Development in Tellu Boccoe Village, Mare District, Bone Regency. Thesis of Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I, Mr. Jam'an and Advisor II Mr. Asdar.

The purpose of this study was to determine the effectiveness of village funds for economic and infrastructure development in Tellu Boccoe Village, Mare District, Bone Regency. This type of research is qualitative research. The processed data is the result of interviews conducted with 6 informants namely the Village Head, Village Secretary, Planning and General Affairs Head, Hamlet Head and the community. Data collection methods used in this study were observation, interviews and documentation.

The results of the research obtained are that the Economic and Infrastructure Development Program of Tellu Boccoe Village, Mare District in Bone Regency has been running quite well when viewed from the three effectiveness inductors starting from the first indicator, namely the achievement of objectives, where in the implementation of the program all are implemented and resolved with on time and on target, the second indicator is integration, where the program has been or has been socialized first in village meetings before implementing the development program, then the third indicator is adaptation, where program planning and implementation are carried out in stages and in accordance with the provisions.

Keywords: Effectiveness of Village Funds, Economic Development and Village Infrastructure



DAFTAR ISI

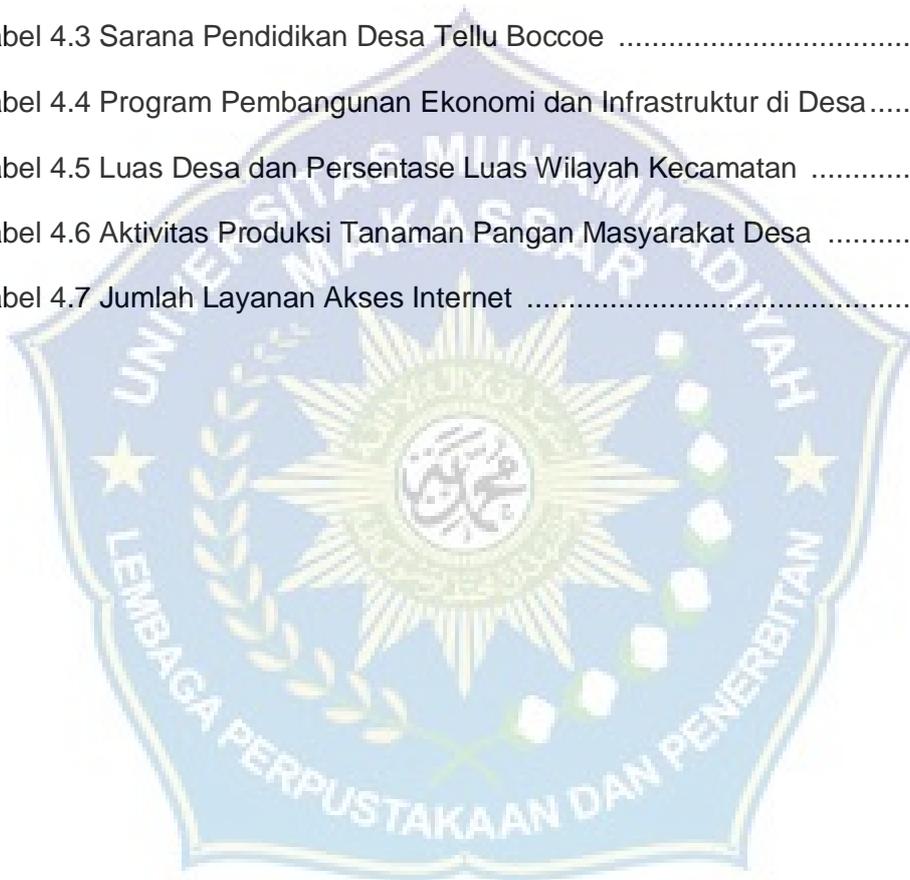
	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori	10
B. Tinjauan Empiris	33
C. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian	39
D. Sumber Data.....	39
E. Pengumpulan Data	40
F. Instrumen Penelitian	40
G. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Daftar Informasi	37
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tellu Boccoe	43
Tabel 4.2 Banyak Penduduk Desa Tellu Boccoe Tahun 2017-2020.....	44
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Tellu Boccoe	45
Tabel 4.4 Program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa.....	46
Tabel 4.5 Luas Desa dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan	50
Tabel 4.6 Aktivitas Produksi Tanaman Pangan Masyarakat Desa	52
Tabel 4.7 Jumlah Layanan Akses Internet	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep	37
Gambar 4.1 Peta Desa Tellu Boccoe.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial seluruh rakyat Indonesia, pemerintah terus mengupayakan pembangunan sosial di seluruh wilayah yang ada di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Pembangunan nasional ini terus dicanangkan dengan harapan terciptanya laju pembangunan daerah dan laju pembangunan kota dan pedesaan yang seimbang dan harmonis. Namun, dalam praktiknya masih banyak dijumpai masalah ketimpangan antara pembangunan di desa dan kota.

Wilayah dengan pemerintahan paling rendah yaitu desa. Desa sendiri, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2014 mengenai Desa yang didalamnya mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 2 tentang Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil bisnis, aset, swadaya dan partisipasi, kerjasama, dan pendapatan asli Desa lainnya; Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; beberapa pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota; Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten atau Kota; Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota; sumbangan tidak mengikat dan hibah dari pihak ketiga; dan pendapatan Desa lainnya yang sah. Undang – Undang tersebut merupakan salah satu komitmen untuk menciptakan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan di desa-desa merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat desa yang tertinggal. Munculnya Undang-Undang yang mengkhususkan aturan desa merupakan sebuah upaya agar seluruh desa yang ada di Indonesia dapat secara mandiri membangun wilayahnya dengan cara mengelola segala sumber potensial yang ada di wilayahnya. Selain itu, dengan tujuan agar desa mampu untuk mengatur dan menggerakkan sendiri rumah tangganya.

Salah satu cara untuk memperkuat perekonomian dipedesaan adalah dengan memperbaiki infrastruktur pedesaan tersebut yang bertujuan untuk memperbesar potensi yang ada dan menjadikan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek. Karna itu perlu dilakukan analisis secara lebih terarah serta keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek diluar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosbud, dan non spasial).

Alokasi Dana Desa adalah dukungan bantuan langsung dari pemerintah yang merupakan wujud nyata dari kebijakan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan desa dengan mendukung peningkatan infrastruktur fisik desa. Diharapkan dengan adanya dukungan

ini, standar kehidupan di masyarakat desa dapat meningkat di mana setiap masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Alokasi Dana Desa juga digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk kehidupan masyarakat yang lebih mandiri. Dana desa sendiri diarahkan untuk pengembangan dan pemeliharaan desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan budaya, sarana dan prasarana ekonomi produktif seperti pasar desa, lumbung desa, proses pembuatan pupuk, dan pengembangan ternak.

Pencapaian sistem pemerintahan desa dapat dilihat dari hasil pembangunan fisik serta administrasi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai dana desa melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi pendorong program pemerintahan desa dengan melibatkan swadaya masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pembangunan khususnya pembangunan fisik desa diprioritaskan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya otonomi desa berarti memberi desa wewenang untuk menangani dan menggunakan sumber daya daerah dengan sebaik-baiknya. Meskipun fokus otonomi adalah di tingkat kabupaten/kota, namun sebenarnya harus dimulai di tingkat terendah pemerintah, yaitu di desa. Selama periode ini, pembangunan desa masih sangat tergantung pada pendapatan asli desa dan bantuan masyarakat, dan anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD kabupaten/kota

sehingga dalam melakukan pembangunan infrastruktur atau sumber daya manusia dianggap kurang efektif

Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Wilayah Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa Sulawesi selatan termasuk dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia. Di Provinsi ini terdapat sebanyak 2.255 (dua ribu dua ratus lima puluh lima) desa, 792 (tujuh ratus sembilan puluh dua) kelurahan, 3017 (tiga ratus tujuh) kecamatan yang terdapat di 21 (dua puluh satu) kabupaten dan 3 (tiga) kota.

Tabel 1.1 : Rincian Alokasi Dana Desa untuk Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBN T.A 2019

No.	Nama Daerah	Dana Desa (Dalam Rupiah)
1.	Kab. Bantaeng	45.639.495
2.	Kab. Barru	49.331.603
3.	Kab. Bone	337.332.552
4.	Kab. Bulukumba	108.344.633
5.	Kab.Enrekang	115.526.328
6.	Kab. Gowa	147.622.452
7.	Kab.Jeneponto	106.818.350
8.	Kab.Luwu	195.242.489
9.	Kab.Luwu Utara	174.756.329
10.	Kab. Maros	86.296.412

11.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	71.198.484
12.	Kab.Luwu Timur	116.788.775
13.	Kab. Pinrang	67.521.173
14.	Kab. Sinjai	70.834.464
15.	Kab. Kepulauan Selayar	82.222.354
16.	Kab. Sidenreng Rappang	65.498.274
17.	Kab. Soppeng	52.014.824
18.	Kab. Takalar	80.246.588
19.	Kab. Tana Toraja	124.964.994
20.	Kab. Wajo	119.030.097
21.	Kab. Toraja Utara	133.918.314

Sumber: Kemendagri Tahun 2021

Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Bone ditetapkan sebesar 337.332.552.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang dialokasikan secara langsung ke masing-masing desa di Kabupaten Bone dan khusus untuk Desa Tellu Boccoe mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar 1.072.238.000 (Satu Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Anggaran diatas merupakan dana yang cukup besar dan dapat menimbulkan masalah yang mengkhawatirkan banyak pihak. Semakin besar dana desa yang didapat semakin besar pula harapan untuk

pembangunan desa dan membantu menyelesaikan masalah kemiskinan di daerah pedesaan, tetapi dikhawatirkan dana desa ini menjadi tempat untuk pejabat desa melakukan korupsi.

Agar dana desa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan maka menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penempatan prioritas pembangunan dana desa tahun 2016. Peraturan menteri tersebut berisi tentang dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas belajar desa disepakati dalam musyawarah desa dan hasil musyawarah tersebut menjadi acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan wilayah ekonomi individu warga kelompok masyarakat.

Melihat hal tersebut, tetapi masih saja muncul permasalahan di tingkatan Desa. Seperti, angka kemiskinan yang lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan. Selanjutnya, pendidikan yang tidak merata di daerah desa, hal ini biasanya dikarenakan kurangnya fasilitas pendidikan di daerah pedesaan, yang membuat warga desa harus

ke daerah perkotaan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak.

Selain itu, permasalahan yang ditemui adalah kurangnya inovasi dari pejabat desa untuk mengelola Penghasilan Desanya sendiri. Desa dikenal dengan Sumber Daya Alam yang sangat melimpah, seperti di Desa Tellu Boccoe yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Namun, masyarakat kurang mampu mengelola hasil pertaniannya sendiri, sehingga masyarakat cenderung menjual hasil taninya secara mentah ke orang lain. Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah pembangunan infrastruktur yang kurang berkembang yang mengarah pada keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengakses informasi bahkan ketika memasuki era modernisasi. Infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menghambat kegiatan dalam aspek ekonomi, karena jalan adalah akses fisik atau penghubung dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, jalan adalah alat transportasi penting jika dilihat dari segi fungsinya. Jalan sebagai penghubung antar wilayah (desa) juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi perekonomian daerah agar dapat tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah mencanangkan program dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan, sehingga aspek fisik dapat memperlancar kegiatan masyarakat khususnya aspek ekonomi. Efektivitas pembangunan dapat berhasil apabila tata Kelola pembangunan didasari pada empat indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan dana desa yang diberikan oleh

pemerintah pusat. Mengingat setiap desa memperoleh milyaran rupiah dan diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa. Dan yang menjadi daerah penelitian adalah desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Maka penulis mengangkat hal ini dalam bentuk Proposal yang berjudul **“Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Di Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa Tellu Boccoe, kecamatan Mare di Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare di Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa. Selain itu juga untuk pengembangan teori- teori yang

membahas mengenai perencanaan pembangunan.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan untuk diharapkan dapat menjadi wawasan baru baik bagi mahasiswa tentang perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan perencanaan pembangunan yang merupakan hal menarik untuk diteliti seperti memberikan wawasan pengetahuan tentang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone Pada Tahun 2022.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan atau output dan input.

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan. Efektif menurut Peter F. Drucker dikutip dari Sadono Sukirno (2004) adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Dan dijelaskan bahwa efektif merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana para manager mencapai sasaran-sasaran organisasi merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manager tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter menjelaskan bahwa efektivitas merupakan pekerjaan yang dilakukan secara

tepat atau menyelesaikan aktivitas-aktivitas yang secara langsung mendorong tercapainya sasaran organisasi. Efektivitas sering diartikan sebagai “mengerjakan hal yang tepat” yaitu menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi untuk mencapai sasarnya. Efektivitas biasa dihubungkan dengan efisiensi. Efisiensi merupakan pekerjaan secara tepat sasaran atau menghasilkan output sebanyak mungkin dengan input sesedikit mungkin.

Ravianto (2014:11) menyatakan bahwa efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. Artinya, jika sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas itu bisa dikatakan efektif. Untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan diperlukan pengetahuan tentang cara mengukur efektivitas.

Menurut Anggi Rahajeng (2015) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan *output-nya (cost of outcome)*.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan definisi universal adalah sebuah aglomerasi sebuah pemukiman di area desa. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia dibawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia. Lalu dijelaskan Kembali pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten.

Kawasan desa adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Bintarto desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-dearah sekitarnya.

b. Sejarah Desa

Pengertian sejarah desa dibedakan menjadi dua. Pertama, sejarah desa ialah sejarah dalam arti yang seluas-luasnya. Disini dimensi waktu menjadi sangat penting, sebab perubahan ialah sebuah proses dalam waktu. Kedua, sejarah desa ialah sejarah yang sangat khusus meneliti tentang desa atau pedasaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian.

Desa atau desa sebagai bidang penelitian tentu dapat dimasukkan dalam satuan tertentu. Salam sejarah desa, desa dapat dimasukkan dalam satuan-satuan:

- 1) Satuan ekosistem, ialah hasil perpaduan antara aktifitas manusia, keadaan biologis dan proses fisik.
- 2) Satuan geografis, terdapat berbagai macam hubungan antar desa.
- 3) Satuan ekonomi, dapat atau tidak menjadi bagian dari satuan geografis dan sebaliknya.
- 4) Satuan budaya, dalam hubungan dengan persoalan adat, satuan penelitian desa dapat berupa daerah hukum adat atau suatu cultural area.

Permasalahn desa sebenarnya sama saja dengan menguraikan sejarah pada umumnya. Permasalahan dalam

sejarah desa dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok:

- 1) Bangunan fisik, sejarah bangunan fisik desa belum banyak mendapat perhatian dari sejarawan, sekalipun dalam sumber- sumber tradisional dan Belanda banyak keterangan mengenai desa.
- 2) Satuan sosial, satuan sosial di lingkungan desa dan masyarakat petani sangat kaya dengan permasalahan sejarah.
- 3) Lembaga sosial, termasuk disini Lembaga pemerintahan, keagamaan, politik, ekonomi, siasal, dll.
- 4) Hubungan sosial, yaitu masalah stratifikasi, integrasi, konflik, mobilitas sosial, migrasi, dan hubungan desa-kota.
- 5) Gejala psiko-kultural, pengaruh kota ke desa mulai kuat. Nilai, norma, dan simbol yang melekat pada masyarakat desa mulai kehilangan makna.

Terbentuknya suatu desa dapat dikarenakan adanya naluri manusia ingin hidup bersama keluarga suami/istri dan anak, serta sanak famili yang kemudian memiliki suatu tempat untuk tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama pada Kawasan tertentu hutan atau area lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di pulau sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga pulau-pulau lainnya di Nusa tenggara,

Kalimantan, dan Papua. (Sumardjo, 2010). Setidaknya ada tiga alasan pokok dari semula orang-orang membentuk masyarakat adalah:

- 1) Untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan.
- 2) Untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar.
- 3) Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Desa pertanian merupakan gejala desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuknya desa-desa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat percahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran.

Desa telah berkembang menjadi kesatuan hukum yang melindungi kepentingan bersama atas penduduknya dilindungi dan dikembangkan menurut ketentuan hukuman adat setempat. Hukuman itu memuat dua hal, yaitu:

- 1) hak untuk mengurus daerahnya sendiri, yaitu kemudian dikenal istilah hak otonomi.
- 2) hak memilih kepala desanya sendiri. Dimasa lalu hak otonomi itu mencakup banyak aspek, hukum perdana, dan hukum pidana pun termasuk di dalamnya. Antara otonimo desa di Jawa, madura, dan Bali dengan desa lain biasa saja berbeda, misalnya di Sumatra Barat dikenal istilah desa ini dengan wilayah negri yang mempunyai hukum adat yang berbeda

dealam hal hak otonomi tersebut. (Sumarjo,2010).

c. Unsur-Unsur Desa

Unsur Unsur desa adalah:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini pota tata pergaulan dan ikatan- ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-belik kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur desa ini tidak lepas satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan hidup atau "*living unit*". Tata kehidupan dalam arti yang baik memberikan jaminan akan ketentraman dan keserasian hidup Bersama desa.

Maju mundurnya desa tergantung pada ketiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor unsur manusia *human efforts* dan tata *geografi "geographical setting"*. Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada "*human efforts*" untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap-tiap desa mempunyai "*geographical setting*" dan "*human efforts*" yang berbeda-beda, sehingga tingkat keadaan kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama. Unsur lain yang termasuk unsur desa yaitu unsur letak. Letak suatu desa pada

umumnya selalu jauh dari kota atau dari pusat-pusat keramaian. Peninjauan kedesa-desa atau perjalanan kedesa sama daerah-daerah yang monoton dan sunyi. Desa-desa yang letaknya pada perbatasan kota mempunyai kemungkinan untuk lebih berkembang dibandingkan dengan desa-desa dipedalaman.

Unsur letak menentukan besar-kecilnya isolasi suatu daerah terhadap daerah-daerah lainnya. Desa yang terletak jauh dari perbatasan kota memiliki lahan pertanian yang luas. Ini disebabkan karena penggunaan lahan dititipkan pada tanaman pokok dan beberapa tanaman perdagangan daripada untuk Gedung-gedung atau perumahan. lain:

d. Fungsi dan Potensi Desa

Desa mempunyai fungsi dan potensi yaitu yang Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa merupakan "hinterland" atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti pada, jagung, ketela, disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buahbuahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.

Kedua, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya.

Ketiga, dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industry, desa nelayan, dan sebagainya.

Desa mempunyai potensi fisis dan potensi non fisis antara lain:

1. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
2. Air dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim, yang merupakan peranan bagi desa agraris.
4. Ternak, dalam artian fungsiternak didesa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan,
5. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Potensi nonfisis meliputi antara lain:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
2. Lembaga-lembaga sosial, Pendidikan dan organisasi-organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

Potensi yang dimiliki setiap desa berbeda, hal ini karena lingkungan geografis dan keadaan penduduknya berbeda, luas tanah, macam tanaman dan tingkat kesuburan tanah yang tidak

sama. Sumber air dan tata cara air yang berlainan menyebabkan cara penyesuaian atau corak kehidupannya berbeda.

Keadaan penduduk dan dasar hidup masyarakat desa yang berbeda mengakibatkan adanya berbagai karakteristik dan berbagai tingkat kemajuan desa, yaitu:

- 1) Desa yang kurang berkembang atau terbelakang.
- 2) Desa yang sedang berkembang.
- 3) Desa berkembang atau desa maju.

Maju mundurnya suatu desa dapat tergantung pada beberapa faktor antara lain disebutkan disini:

- 1) Potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi penduduk warga desa beserta pamongnya.
- 2) Interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa tercakup didalamnya perkembangan komunikasi dan transportasi.
- 3) Lokasi desa terhadap daerah-daerah disekitarnya yang lebih maju.

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) membawa perubahan pada tata kelola pemerintah desa, terutama pengelolaan keuangan desa. Semangat lahirnya UUD Desa adalah undang memperkuat desa. Banyak nyata penguatan keuangan desa dalam UUD Desa adalah terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber penerimaan desa yang disebut dana desa.

Pasal 1 angka 8 peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi anggaran untuk desa ditetapkan sebesar 10% dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Ada kekeliruan masyarakat dalam memahami antara dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), sebenarnya kedua program ini memiliki perbedaan yaitu, Dana Desa (DD)

merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Besaran ADD masing- masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah sepuluh persen (10%) (Kementrian Desa, 2016).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota digunakan untuk membiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa telah menjadi isu krusial dalam undang-undang desa, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dalam penyelenggaraan kegiatan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan (Prabawa, 2016). Dana Desa setiap

kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar Kab/kota dan Alokasi Formula kab/kota. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (Sembilan Bulun Bersen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Besaran Alokasi dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi dasar dengan jumlah desa di kabupaten/kota.

Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10 % (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan
- c) 10 % (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) kabupaten/kota. Dana Desa setiap kabupaten/kota. Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap

kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Besaran Alokasi dasar setiap desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dengan jumlah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a) 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
- d) 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan Indeks kesulitan geografis (IKG) Desa. IKG Desa ditentukan oleh faktor yang terdiri atas ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas transportasi.

b. Tujuan Dana Desa

Pada dasarnya program pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dan memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembanguana secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional. Tujuan dari dana desa dari kementerian keuangan RI yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

c. Sumber Dana Desa

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat

kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- 2) Dana Desa dari APBN
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah

d. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Kecamatan akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa. Inspektorat yang berasal dari Kabupaten akan melakukan audit setiap tahunnya. Begitu juga dengan BPK yang berasal dari pusat akan melakukan audit setiap tahunnya.

Anggaran dana desa yang berlebih setiap tahunnya atau yang sering disebut dengan sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahunan Berjalan (SILPA) tidak dapat digunakan pada tahun berjalan.

e. Peraturan Dana Desa

Adapun Peraturan Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Peratiran Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- 3) Peratiran Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usuk dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- 6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- 7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan

Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

f. Prinsip-prinsip Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan dana desa maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.
- 3) Tipologi desa, dengan memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis,

antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan antarperkembangan dan kemajuan desa.

g. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab kepala desa sebagai pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa, dan dilampiri:

- 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
- 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

h. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- 2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dari bupati/walikota.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah menteri c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I dari bupati/walikota yang menunjukkan paling kurang 50%. Penyaluran dana desa tahap I dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota, setelah menerima dari kepala desa berupa

- 1) Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I dari kepala desa yang menunjukkan dana desa telah digunakan paling kurang sebesar 50%. Dalam hal ini terdapat desa terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui

peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapital. Jadi tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktivitas.

Teori-teori pembangunan ekonomi menurut para ahli:

- a) Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, akan mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin- mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.
- b) Menurut David Ricardo, di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi capital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Untuk

golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas area tanah yang disewakan. Menurut David Ricardo apabila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi capital terus- menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan di antara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga sampai pada tingkat keuntungan yang normal saja.

- c) Menurut Malthus untuk adanya perkembangan ekonomi diperlukan adanya kenaikan jumlah kapital untuk investasi yang terus menerus. Adanya perkembangan ekonomi atau kenaikan produksi diharapkan bila ada tabungan yang digunakan untuk keperluan investasi. Tetapi investasi ini dihambat oleh kurangnya permintaan efektif. Adapun kurangnya permintaan efektif disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang berakibat menekan tingkat upah dan di samping itu juga karena pendapatan yang diterima ada yang ditabung dan tidak dikonsumsi semua.

5. Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2013).

Menurut Mankiw (2003:38) yang dikutip dari Tunjung Hapsari (2011) menjelaskan bahwa sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, telepon dll. Familo (2004:16) menyebut infrastruktur sebagai *basic essential service* dalam proses pembangunan. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua kelompok yaitu infrastruktur berdasarkan fungsi dan peruntukannya. Amilo (2004:20) menjelaskan bahwa insfrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial. Infrastruktur memegang peran penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi diberbagai negara. Insfrastruktur ekonomi diantaranya *utilitas publik* seperti tenaga listrik, telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi, dan saluran pembuangan dan gas. Kemudian juga termasuk pula pekerja umum, seperti jalan, kanal, bendungan, irigasi dan drainase serta proyek transportasi seperti jalan

kereta api, angkutan kota, waterway, dan bandara sedangkan infrastruktur sosial dapat dibedakan menjadi infrastruktur pendidikan dan kesehatan.

Menurut Canning dan Pedroni (2004:11) menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian tentang dana desa yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan skripsi Ekonomi yang menjadi referensi penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahul

No.	Nama (Tahun)	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Yunia Novita Sari (2017)	Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur pedesaan di Kabupaten Langkat	Data primer dan sekunder	Kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan, memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. Namun masih lebih besarpersentase yang menyatakan tidak bertambahnya pendapatan masyarakat

				dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan disebabkan karena adanya dana desa melainkan dari faktor usaha masyarakat sendiri.
2.	Nova Sulasri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Waropute Kabupaten Muna	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dikatakan kurang efektif. Partisipasi masyarakat sangat rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo
3.	Dini (2010)	Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	Penelitian Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat.

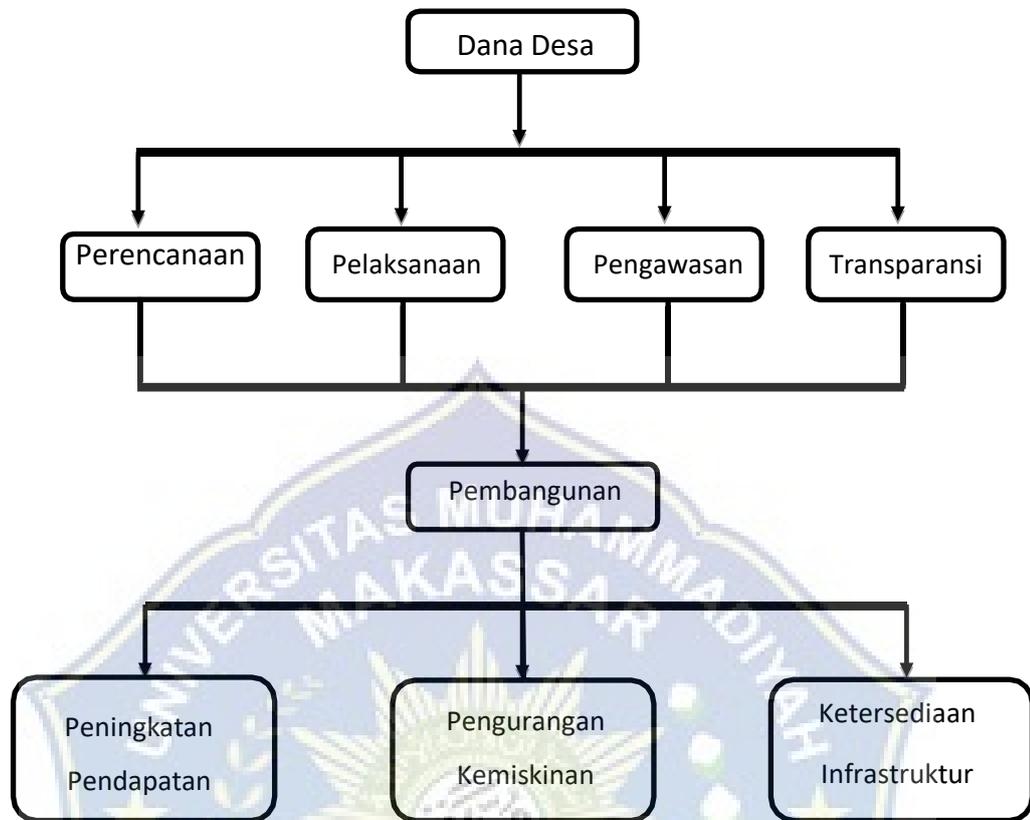
4.	Nurliana (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), namun karena keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah terhadap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat bangunan fisik kurang tepat sasaran.
5.	Tumbel (2014)	Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kab. Minahasa (Selatan))	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan desa dan pembangunan desa terdapat hubungan yang signifikan dan erat.

C. Kerangka Pikir

Objek dari penelitian ini adalah dana desa di desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare di Kabupaten Bone. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa.

Berdasarkan penelitian tersebut perlu diteliti efektivitas dari dana desa yang telah diberikan kepada desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan menganalisis deskripsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi dana desa. Keberhasilan dana desa di desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone dilihat dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk melihat pembangunan ekonomi Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone dengan menganalisis peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik setelah adanya dana desa, sehingga pengembangan wilayah di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut saya pengertian kualitatif menurut saya adalah jenis penelitian yang menggunakan sistem deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis suatu data. Selain itu, penelitian kualitatif juga dijelaskan dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan pada teori yang ada. Menurut M.Iqbal Hasan metode deskriptif ini digunakan untuk melakukan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif pada hakekatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah.

Penelitian kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik atau model ekonometrik tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada Teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data tabulasi, dalam hal ini hanya sekedar membaca tabel, grafik atau angka yang tersedia, kemudian dilakukan penguraian dan penafsiran. Menurut sugiono (2003) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, gambar. Data kualitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang digunakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare di Kabupaten Bone sehingga dapat diketahui efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut

C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

1. Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone merupakan desa yang menerima program dana desa.

2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bone merupakan salah satu Kabupaten yang menerima dana Desa paling besar di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 337.332.552.000,00 dan Desa Tellu Boccoe sebesar 1.072.238.000. Dana ini merupakan dana yang sangat besar.

D. Sumber Data

Data dan informasi mengenai efektivitas dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare di Kabupaten Bone didasarkan pada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui *field research* (penelitian lapangan)

penelitian langsung dengan melihat laporan hasil pekerjaan dan dapat diperoleh dari setiap informan yang diamati atau diwawancarai dilokasi penelitian, dalam hal ini peneliti akan mengambil informan untuk dijadikan sampel sebanyak 7 (tujuh) orang dalam penelitian ini pada Pemerintah Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone yakni: a) Kepala Desa, b) Sekertaris Desa, c) Kaur Perencanaan, d) 3 Kepala Dusun, e) Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data ini bersumber dari penelitian kepustakaan yang berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, jurnal ilmiah, skripsi atau bahan lainnya yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian ini.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan langsung ke desa di Kabupaten yang menjadi subjek penelitian.
- 2) Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat.
- 3) Dokumentasi, yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisisioner dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif atau instrumen utama pengumpulan data adalah penelitian itu sendiri dengan cara melakukan observasi, wawancara langsung kepada terkait, formular lainnya yang berkaitan dengan

pencatatan data sehingga penelitian mendapatkan data yang valid.

G. Teknik Analisis Data

Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode analisa dengan mengumpulkan data secara sistematis, menganalisa dan menginterpretasikan data dengan gambaran-gambaran sehingga mendapat kesimpulan dalam penelitian ini yang terdapat dua permasalahan yang dianalisis. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

- 1) Reduksi Data (*Data Reduction*) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian Data (*Data Display*) Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang

bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel atau gambar.

- 3) Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*) Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema hubungan persamaan, alur sebab- akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Tellu boccoe adalah salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa tellu Boccoe terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Pao dan dusun Sabballoa dengan luas wilayah 11,78 Km².

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Tellu Boccoe

Wilayah	Perbatasan
Utara	Mattampawalie
Selatan	Padaelo dan ujung salangketo
Timur	Kadai
Barat	Data

Sumber : Desa Tellu Boccoe

Desa Tellu Boccoe terletak di wilayah pemerintahan kecamatan Mare Kabupaten Bone, jarak dari ibu kota kecamatan 100 meter dan jarak dari ibukota kabupaten 34 km jika menggunakan kendaraan bermotor maka jarak tempuh kekota kecamatan ± 5 menit, dan ± 45 menit menuju Ibu kota kabupaten. Luas wilayah desa Tellu Boccoe 11,78 Km².



Sumber : goolgemaps.com

Gambar 4.1 Peta desa Tellu Boccoe

a. Visi dan misi desa Tellu Boccoe

1). Visi

Tahun 2022-2027, desa Tellu Boccoe terkemuka dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

2). Misi

- a. Membangun sistem administrasi pelayanan sipil dan pelayanan umum desa yang memuaskan masyarakat
- b. Membuka ruang ketersediaan lapangan kerja baru di luar pertanian tanaman pangan bagi masyarakat
- c. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan kerja masyarakat sesuai lapangan kerja baru yang tersedia.

b. Kondisi demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk perkilometer persegi (BPS,2021).

Jumlah penduduk Desa Tellu Boccoe pada tahun 2020 sebanyak jiwa Jumlah penduduk setiap dusun dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.2 Banyak Penduduk Desa Tellu Boccoe tahun 2019-2022

Jenis	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
P	642	647	658	670
L	713	723	731	743
Total				

Sumber : Desa Tellu Boccoe

Berdasarkan table 4.2 di atas dari kurung waktu 4 tahun jumlah penduduk di Desa Tellu Boccoe mengalami kenaikan, ini ditunjukkan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk mencapai 1.984 jiwa.

c. Sarana Pendidikan

Kondisi Desa Tellu Boccoe dari aspek Pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana Pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan Desa Tellu Boccoe

Dusun	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK?MA	Taman Bacaan
Pao	1	1	1	0	1
Sabballoa	0	0	1	0	0
Total	1	1	2	0	1

Sumber : Desa Tellu Boccoe

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa sarana Pendidikan yang ada di Desa Tellu Boccoe berjumlah 5 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTS dan seterusnya penduduk Desa Tellu Boccoe harus mencari sekolah diluar desa tellu boccoe.

B. Hasil Penelitian

1. Program Yang Terealisasi

Berikut ini adalah program pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Tellu Boccoe yang terealisasi tahun 2022 yang dananya bersumber dari Dana Desa yaitu:

**Tabel 4.4 Program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur di Desa
Tellu Boccoe Tahun 2022**

PENDAPATAN			
URAIAN	ANGGARAN (RP.)	REALISASI (RP)	KURANGI LEBIH/ (RP.)
Pendapatan Asli Desa	14.599.500	14.599.500	
Pendapatan Teransfer	1.297.936.700	1.297.936.700	
Dana Desa	992.958.000	992.958.000	
Bagian Dari Hasil Pajak	25.343.000	25.343.000	
Alokasi Dana Desa	279.635.700	279.635.700	
Pendapata Lain Lain	9.107.552	9.107.552	
JUMLAH PENDAPATAN	1.321.643.752	1.321.643.752	
BELANJA			
URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	KURANG LEBIH/ (RP)
Bidag Penyelangan Perintah Desa	314.513.511	313.806.480	707.031
Bidan Pelaksanaan Pembangunan Desa	593.358.000	583.984.500	9.373.500
Bidadang Pembinaan kemasyarakatan Desa	7.3200.000	7.200.000	-
Bidang Penagulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	399.600.000	399.600.000	-
JUMLAH BELANJA	1.314.671.511	1.304.590.980	10.080.531
SURPLUS/(DEFISIT)	6.972.241	17.391.469	(10.419.280)
PEMBIAYAAN			
URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	KURANG/L EBIH (RP)
Penerimaan Pembiayaan	1.135.311	1.135.311	-
PEMBIAYAAN NETTC	1.135.311	1.135.311	-
SILPA			
URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	KURANGI/ LEBIH(RP)
SELISIH PEMBIAYAAN	8.107.552	18.526.780	(10.419.288 .00)

Sumber: Data diolah

2. Efektifitas Dana Desa

Efektivitas Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dilihat dari indikator pencapaian tujuan.

Dalam indikator pencapaian tujuan ada dua sub indikator yang perlu dilihat yang terdiri dari tepat waktu dan tepat target atau tepat sasaran.

Berdasarkan hasil-hasil temuan yang didapatkan melalui wawancara dengan kepala desa, aparat desa serta masyarakat desa Tellu Boccoe, bahwa untuk pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tellu Boccoe semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan juga pelaksanaan program pembangunan tersebut tentunya sudah tepat di Desa Tellu Boccoe, karena melalui pembangunan tersebut maka masyarakat Desa Tellu Boccoe sangat merasa terbantu dan juga program tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Tellu Boccoe. Adapun beberapa program tersebut seperti program pembangunan jalan setapak, pembangunan taman baca.

- b. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan dilihat dari indikator itegrasi.

Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Tellu Boccoe terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa/musyawarah dusun, pelaksanaan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta masyarakat juga sangat

tertarik akan program tersebut mengingat untuk pembangunan Desa Tellu Boccoe juga untuk kemajuan Desa.

- c. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan dilihat dari indikator adaptasi.

Adapun pelaksanaan Program Pembangunan ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan dimulai dari tahap perencanaan program melalui rapat dusun kemudian usulan masyarakat dirangkum kemudian dibawah ke musyawarah desa sebelum melaksanakan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu rapat para pelaksanaan kegiatan yang juga melibatkan masyarakat dan tenaga kerja. Adapun Anggaran untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut berasal dari Dana Desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimana 30% digunakan untuk operasional dan 70% digunakan untuk pembangunan. Dana desa dikatakan efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan juga kebijakan dana desa itu sendiri. Efektivitas kebijakan dana desa dapat diukur menggunakan lima ketepatan yaitu tepat kebijakan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses (Fhatimatuz, 2018).

Berdasarkan siklus dalam kegiatan dana desa dari Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone adalah Penyiapan rencana, Musrenbangdesa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa, Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa, Penetapan APB desa, Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola, Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib

menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa dan Pemanfaatan dan pemeliharaan.

a. Efektifitas Kebijakan Dana Desa

Efektivitas Kebijakan Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana Desa. Dalam penerapan alokasi dan tahapan yang akan dicapai kedepannya, tim pelaksana Desa perlu bersikap terbuka kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan upaya pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellu Boccoe agar menciptakan suatu rasa kepercayaan terhadap pemerintah desa agar masyarakat juga paham program apa saja yang akan dijalankan. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan pada seluruh aspek bagian yang menjadi salah satu unsur dalam pengalokasian dana desa agar dapat efektif dan berjalan sesuai dengan rencana dengan melihat beberapa faktor berdasarkan dari luas wilayah, tingkat produktifitas masyarakat dan fasilitas umum yang diperoleh masyarakat di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Berdasarkan pada luas wilayah maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5

**Luas Desa dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan Menurut
Kelurahan/Desa di Kecamatan Mare**

No	Kelurahan/Desa	Luas (km ²) Total Area
1	Padaelo	20,86 km ²
2	Mattirowalie	29,75 km ²
3	Mario	19,85 km ²
4	Ujung Salangketo	15,47 km ²

5	Tellu boccoe	11,78 km ²
6	Mattampa Walie	21,26 km ²
7	Ujung Tanah	27,13km ²
8	Sumaling	17,36 km ²
9	Tellongeng	17,5 km ²
10	Data	19,85 km ²
11	Batu Gading	8,24 km ²
12	Cege	15 km ²
13	Kadai	12,87 km ²
14	Lakukang	15,05 km ²
15	Pattiro	13,47 km ²
16	Lapasa	6,5 km ²
17	Karella	5,4 km ²
18	Lappaupang	16 km ²

Sumber : BPS Kecamatan Mare Dalam Angka tahun 2021,(Diolah)

Efektivitas suatu kebijakan dapat dipengaruhi dari luas wilayah yang akan mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melihat kebijakan apa yang harus dikeluarkan agar dapat secara efektif berjalan dan berguna bagi masyarakat. Dari setiap orientasi kebijakan yang direncanakan, sedang dijalankan dan terealisasi seluruh kebijakan dibahas secara musyawarah agar aspek yang direncanakan dapat dievaluasi terlebih dahulu sehingga efektivitas kebijakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan mendengarkan pendapat dari seluruh masyarakat agar kebijakan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan efektif berdasarkan analisis isi wawancara terhadap responden atau narasumber banyak menyebutkan bahwa. Pelaksanaan efektivitas kebijakan dana desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Bapak Muhammad Ansar S.Pd sebagai Kepala Desa Tellu Boccoe menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan bersama dengan BPD (Badan Pemerintah Daerah) dan masyarakat melalui musyawarah dalam membahas terkait kebijakan yang akan dijalankan guna tercapai suatu efektivitas kebijakan danadesa” Wawancara ini berlangsung pada 01 September 2021.

Pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap alokasi dana desa dari program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur agar dapat terus dijalankan. Pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Dana Desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Ibu Fifi Defiani Ansar sebagai Sekertaris Desa Tellu Boccoe menjelaskan bahwa:

“Sudah dijalankan dan direalisasikan dengan tepat waktu karena pembangunan ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat”
01 September 2021.

Jadi diketahui dari pelaksanaan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan dari program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga Efektivitas Kebijakan Dana Desa dapat berjalan dengan baik.

b. Pembangunan Ekonomi

Secara dinamis, Pembangunan Ekonomi adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan Ekonomi agar dapat menjadi suatu proses yang bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia

dan struktur sosialnya. Pembangunan Ekonomi juga dapat meningkatkan tingkat laju perekonomian baik suatu negara maupun suatu daerah/desa. Hal ini dapat merubah setiap struktur yang ada dalam pada perekonomian. Penjelasan diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subandi (2011), proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan Ekonomi secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang.

Tabel 4.6

Aktivitas Produksi Tanaman Pangan Masyarakat Desa Tellu Boccoe

No	Jenis Tanaman Pangan	Persen%
1	Padi	89%
2	Jagung	6%
3	Kacang tanah	5%

Sumber : BPS Kecamatan Mare Dalam Angka tahun 2021,(Diolah)

Menurut Easton (2016) Pembangunan Ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Berdasarkan analisis isi wawancara terhadap responden atau narasumber banyak menyebutkan bahwa. Dari program Pembangunan Ekonomi kebijakan dana desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Bapak Sulaeman sebagai Sekertaris di desa Tellu Boccoe menjelaskan bahwa:

Dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan masyarakat selalu dilibatkan agar pemerintah Desa tidak salah dalam mengambil keputusan dan keputusan bisa dirasakan masyarakat secara tepat. Dari setiap aktivitas perencanaan harus dapat dilihat dari beberapa aspek pendukung dan aspek penghambat agar bentuk perencanaan bisa dinilai secara efektif.

“Pelaksanaan program pembangunan ekonomi dilaksanakan umumnya setiap satu tahun sekali ketika dana desa telah diterima dan dari beberapa faktor lain yang membuat program pembangunan ekonomi bisa disesuaikan dari kondisi cuaca dan kebutuhan masyarakat Desa Tellu Boccoe” 02 September 2021.

Bagian yang terpenting dalam pelaksanaan program yaitu bentuk kerjasama dari seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari perhatian masyarakat dalam mengawasi program pembangunan ekonomi secara langsung dalam mengikuti musyawarah dan memberikan beberapa pendapat agar program yang dijalankan berhasil. Dari program Pembangunan Ekonomi kebijakan dana desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Bapak Mapeare sebagai Kepala Dusun Sabbalooa menjelaskan bahwa:

“Seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam mendukung keberhasilan setiap program dan yang terlibat dalam program Pembangunan Ekonomi yaitu Kepala Desa, Badan Pemerintah Daerah (BPD), Aparat Desa dan Tokoh masyarakat” 02 September 2021.

Dari program Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan pemerintah desa dalam upaya menciptakan dan membuka banyak kesempatan bagi

masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi yang ada dari Desa Tellu Boccoe seperti hasil produktivitas tanaman pangan yang dapat bernilai ekonomi sehingga dari Program Pembangunan Ekonomi, masyarakat dapat mengembangkan lebih banyak lagi peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Tellu Boccoe.

c. Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial dapat digunakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan. Dari 100% kebijakan alokasi dana desa 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa, Infrastruktur yang saat ini terealisasi di desa Tellu Boccoe dan bermanfaat bagi masyarakat yaitu layanan jaringan akses internet di Desa Tellu Boccoe dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.7

Jumlah Layanan Akses Internet Kelurahan/Desa di Kecamatan Mare

No	Kelurahan/Dusun	Jumlah Menara Pemancar	Jumlah Operator layanan internet	Kondisi jaringan
1	Pao	1	1	Kuat
2	Sabballoa	1	1	Kuat

Sumber : BPS Kecamatan Mare Dalam Angka tahun 2021,(Diolah)

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan desa tentang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur membuat masyarakat lebih terbantu misalkan

dalam bentuk kerjasama antara pihak operator terhadap pemerintah Desa Tellu Boccoe dalam mendirikan tower jaringan akses internet di Desa Tellu Boccoe, bisa membantu masyarakat mengakses Internet dengan mudah. Apalagi di era pandemic seperti saat ini ketika seluruh aktivitas pendidikan dialihkan semua berbasis online dan segala bentuk informasi dan komunikasi dapat di akses menggunakan jaringan internet. Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat agar lebih memfokuskan pada pembangunan fisik sehinggah dapat bermanfaat dan banyak membantu masyarakat dalam menggunakan layanan akses jaringan internet. Berdasarkan analisis isi wawancara terhadap responden atau narasumber banyak menyebutkan bahwa. Dari program Infrastruktur kebijakan dana desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Alimuddin bekerja sebagai Wiraswasta menjelaskan bahwa :

“Keuntungan yang didapatkan bagi masyarakat Desa Tellu Boccoe dalam program Infrastruktur sangat membantu dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari mulai dari Infrastruktur jalan hingga pendirian tower menara layanan akses internet di Desa Tellu Boccoe” 01 September 2021.

Manfaat yang didapatkan dari Infrastruktur sangat beragam dan berguna dalam membantu mobilitas kegiatan masyarakat dari berbagai aspek kemudahan tersebut pemerintah Desa Tellu Boccoe harus banyak memperhatikan kebutuhan dari seluruh masyarakat agar Infrastruktur yang direncanakan dan dijalankan dapat membantu masyarakat dalam pemanfaatanya. Dari program Infrastruktur kebijakan dana desa tersebut

telah dibuktikan dari pernyataan Mujahiddin bekerja sebagai Wiraswasta menjelaskan bahwa :

“Sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas terkhusus pada penggunaan jalan dan masyarakat yang membutuhkan layanan akses internet memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi dan mencari beragam jenis informasi karena saat ini internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dalam aspek pendidikan maupun masyarakat secara umum” 01 September 2021.

Seluruh program Infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Tellu Boccoe sebagai upaya membantu mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dari Infrastruktur jalan dan Infrastruktur pendirian tower jaringan akses internet sehingga masyarakat di Desa Tellu Boccoe dapat sangat terbantu dan memudahkan masyarakat saat ingin berkomunikasi dan mengakses informasi menggunakan jaringan internet. Dari hasil penelitian tersebut diatas dari Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone dari program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur sudah berjalan sangat baik pada Efektivitas Kebijakan Dana Desa. Dari setiap bentuk program yang direncanakan dan telah terealisasi seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan pada musyawarah dan bentuk perhatian masyarakat Desa Tellu Boccoe agar dapat mengawasi efektivitas kebijakan program yang dijalankan. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkepanjangan dengan tetap menyesuaikan situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan menjelaskan beberapa pernyataan dari setiap responden yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum bahwa:

1. Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur mengacu pada setiap aspek pelaksanaannya dalam menjalankan dan merealisasikan seluruh program agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, Hal ini dibuktikan dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah pada pengambilan suatu keputusan dan antusias masyarakat dalam mengawasi setiap program yang akan dijalankan sehingga dapat tercapai Efektivitas Kebijakan Dana Desa. Maka dapat dijelaskan bahwa efektivitas bagi program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur dapat berjalan dengan baik di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
2. Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu program pemerintah Desa Tellu Boccoe dalam mengupayakan agar masyarakat dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada di Desa Tellu Boccoe dalam menciptakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomi seperti produktivitas tanaman pangan yang bisa dikembangkan jauh lebih baik lagi kedepan sehingga pendapatan masyarakat dapat semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Maka hal ini dapat dibuktikan bahwa Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Ekonomi sudah berjalan efektif dalam meningkatkan potensi yang ada di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

3. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Infrastruktur dapat dinilai secara langsung karena bentuk dari Infrastruktur memiliki wujud dan fisik yang ada sehingga Infrastruktur merupakan keuntungan yang didapatkan bagi masyarakat dari fasilitas jalan yang baik sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman saat berkendara dan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah Desa Tellu Boccoe dengan beberapa Perusahaan provider dalam mendirikan beberapa tower jaringan internet, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran tower jaringan internet yang memudahkan masyarakat dalam mengakses internet di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia Novita Sari. 2017. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan, memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan, namun masih lebih besar persentase yang menyatakan tidak bertambahnya pendapatab masyarakat dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan di sebabkan karna adanya dana desa melainkan dari faktor usaha masyarakat sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tellu Boccoe jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan, dimana dalam pelaksanaan program tersebut semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran karena melalui pembangunan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu dan juga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Tellu Boccoe. Untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah Desa sebelum melaksanakan program pembangunan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi, dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya transparan dalam anggaran pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
2. Kurangnya pengawalan terhadap pengembangan sumber perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Makassar.
- Anggraini, and Susan Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. (<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertianefektivitasdanlandasan.html>. Diakses 29 Juli 2016).
- Arsyad, Lincolin, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Bintarto, R 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Canning dan Pedroni. 2004. *Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*. (<https://econpapers.repec.org/paper/wilwileco/2004-04.htm>)
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Press, Bogor.
- Dini, Gemala Sari, 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hapsari, Tanjung, 2011. "Pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Kemenkeu RI, 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiha, 2010. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nurliana, 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara*. EJournal Administrasi Negara, Volume 1 No. 3, 2013: 1059-1070.
- PPID, "Peraturan Dana Desa", <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-dana-desa>(diakses 1 Februari 2018).
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*, Jakarta.

- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri* No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri* No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri* No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta.
- _____. 2015. *Peraturan Pemerintah* Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Desa* Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- _____. 2003. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Robbins, Stephen P. Coulter, Mary. 2016. *Managemen*. Pearson Education: London.
- Sadono Sukirno. 2016. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jilid III. Rajagrafindo: Jakarta.
- Subandi. 2011. *"Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)"*. Bandung: Alfabeta
- Tumbel, T. M. 2014. *Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal LPPM Bidang EksosBudKum, Volume 1 No. 2.
- Yunia, Novita Sari, 2017. *Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Langkat*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Daftar Pertanyaan	Coding
	Kepala Desa	
1.1	Apakah benar bapak sendiri yang merencanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang ada di Desa ini?	R
1.2	Apa yang mendorong sehingga bapak berinisiatif untuk mengadakan pembangunan tersebut?	R
1.3	Menurut bapak apakah pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya?	R
1.4	Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program ini?	R
1.5	Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan?	R
1.6	Apakah bapak terjun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut?	R
1.7	Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembanguan ini?	R
1.8	Bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program ini?	R
1.9	Kapan saja dilaksanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa ini?	R
1.10	Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program ini?	R
1.11	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program ini?	R
NO	Pertanyaan	Coding
	Masyarakat	
2.1	Siapa yang merencanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J
2.2	Siapa yang merencanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J

2.3	Bagaimana tanggapan anda tentang pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J
2.4	Apakah pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan sudah tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya?	M, K, DFA, MS, J
2.5	Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan?	M, K, DFA, MS, J
2.6	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J
2.7	Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut?	M, K, DFA, MS, J
2.8	Kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut?	M, K, DFA, MS, J
2.9	Apakah dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan tersebut?	M, K, DFA, MS, J
2.10	Kapan saja dilaksanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pembangunan di Desa ini?	M, K, DFA, MS, J
2.11	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI PENELITIAN





LAMPIRAN 3



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 155/05/A.2-II/XII/45/2023 Makassar, 20-12-2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : FAJAR ADISAPUTRA

Stambuk : 105711100217

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : Efektifitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa tellu boccoe kec mare di kabupaten bone tahun 2022

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. *Rektor Unismuh Makassar*
2. *Arsip*

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN MARE
DESA TELLU BOCCOE

Alamat : Jl. Kuburan Desa Tellu Boccoe Kec. Mare Kab. Bone-Kode Pos 92773

Mare, 28 Desember 2023

Kepada :

Yth. Universitas Muhammadiyah
Makassar Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis

Di-
Makassar

Nomor : 01/ DS-TB/ XII/ 2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring salam serta doa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Amin

Menindak Lanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian Tanggal 04 Desember 2023 Nomor : 155/05/A.2-11/XII/45/2023 perihal : Permohonan Izin Penelitian, Olehnya itu Berdasarkan Surat Permohonan tersebut Kami Berikan Surat Persetujuan Penelitian Kepada :

Nama : FAJAR ADI SAPUTRA
T/Tgl Lahir : SABBALLOA, 23 FEBRUARI 2000
NIM : 105711100217
Program Study : EKONOMI PEMBANGUNAN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : DESA TELLU BOCCOE

Telah melakukan penelitian dari tanggal 04 Desember 2023 s/d 04 Januari 2023 Di Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Demikian Surat ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.



MUHAMMAD ANSAR S.Pd

LAMPIRAN 5



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN MARE
DESA TELLU BOCCOE**

Alamat : Jl. Kuburan Desa Tellu Boccoe Kec. Mare Kab. Bone-Kode Pos 92773

Mare, 28 Desember 2023

Kepada :

Yth. Universitas Muhammadiyah
Makassar Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis

Nomor : 01/DS-TB/XII/2023
Lampiran :
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Di-
Makassar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring salam serta doa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, Amin

Menindak Lanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian Tanggal 04 Desember 2023 Nomor :
155/05/A.2-11/XII/45/2023 perihal : Permohonan Izin Penelitian, Olehnya itu Berdasarkan Surat
Permohonan tersebut Kami Berikan Surat Persetujuan Penelitian Kepada :

Nama : FAJAR ADI SAPUTRA
Tgl Lahir : SABBALLOA, 23 FEBRUARI 2000
NIM : 105711100217
Program Study : EKONOMI PEMBANGUNAN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : DESA TELLU BOCCOE

Telah melakukan penelitian dari tanggal 04 Desember 2023 s/d 04 Januari 2023 Di Desa Tellu
Boccoe Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Demikian Surat ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.



BIOGRAFI PENULIS



Fajar Adi Saputra, panggilan Fajar lahir di Bone pada tanggal 23 Februari 1999 dari pasangan suami istri Bapak Muh Nasrum, S.Pd dan Ibu Megawati. Peneliti adalah anak ke 3 dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 675 Tellu boccoe lulus tahun 2011, SMPN 1 Mare lulus tahun 2014, SMAN 2 Bone lulus tahun 2017, dan mulai tahun 2017 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammdiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.